



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Bogor Agricultural University

# PEMBANGUNAN KEHUTANAN INDONESIA BARU

Refleksi dan Inovasi Pemikiran

Editor:  
Didik Suharjito  
Haryanto R. Putro

Ditributkan dalam rangka Dies Emas (50 Tahun)  
Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor  
2013



# PEMBANGUNAN KEHUTANAN INDONESIA BARU

Refleksi dan Inovasi Pemikiran

Editor:  
**Didik Suharjito**  
**Haryanto R. Putro**

*Diterbitkan dalam rangka Dies Emas (50 Tahun)*  
*Fakultas Kehutanan*  
*Institut Pertanian Bogor*  
*2013*



Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

# PEMBANGUNAN KEHUTANAN INDONESIA BARU Refleksi dan Inovasi Pemikiran

Editor  
Didik Suharjito  
Haryanto R. Putro

Copyright © 2013 Fakultas Kehutanan IPB

Penyunting : Yuki HE Frandy  
Desain Sampul : Sunny Etyarsah  
Penata Isi : Ardhya Pratama  
Koreksi : Dwi Nastiti, Nia Januarini  
Ilustrasi Sampul : all-free-download.com

PT Penerbit IPB Press  
Kampus IPB Taman Kencana Bogor

Cetakan Pertama: Desember 2013

Dicetak oleh Percetakan IPB

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang  
Dilarang memperbanyak buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

ISBN: 978-979-493-611-5

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



# DAFTAR ISI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	
© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.	
BAGIAN I: Prilog	
Dekan Fakultas Kehutanan IPB	v
Pengantar	vii
Penulis	ix
Daftar Isi	xiii
BAGIAN II: Paradigma, Teori, dan Kebijakan Manajemen Hutan	
1. Perkembangan Paradigma Kehutanan (Endang Suhendang)	9
2. Membangkitkan Kehutanan Indonesia: Kristalisasi Konsep dan Strategi Implementasi (D. Darusman, Hardjanto, D. Suharjito, Bahruni, I. Ichwandi, Y. Hero, H. Kartodihardjo, Sudaryanto, B. Nugroho, D.R. Nurrochmat, L. Sundawati, H. Purwawangsa, S. Trison, S. Soedomo)	51
3. Keaneekaragaman Hayati bagi Ketahanan Nasional Bangsa Indonesia (Hadi S. Sukodra)	69
BAGIAN III: Konsep dan Teori Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan	
4. Pengelolaan Hutan Berbasis Ekosistem: Suatu Tinjauan Teori, Fakta, dan Implementasi (H. Purnomo, A. Hadjib, M.B. Saleh, B. Kuncahyo, T. Rusolono, B. Prihantono, S. Rahayu, N. Puspaningsih, Muhdin, T. Tiryana, Priyanto, Hendrayanto, U. Rosalina, N.M. Arifjaya, I.N.S. Jaya, E. Suhendang, H. Haeruman)	91



## Daftar Isi

5.	<i>Re-engineering</i> Penatagunaan Kawasan Hutan (Sambas Basuni).....	117
6.	Menatap Masa Depan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Indonesia dalam Mewujudkan Kehutanan Indonesia Baru (Elias) .....	131
<b>BAGIAN IV: Pengembangan Teknologi Silvikultur..... 157</b>		
7.	Pengelolaan Ekosistem Hutan Produksi Lestari di Indonesia dengan Penerapan Multisistem Silvikultur (Andry Indrawan) .....	159
8.	Ekosistem Mangrove untuk Menunjang Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (Cecep Kusmana).....	185
<b>BAGIAN V: Hasil Hutan dan Pengembangan Teknologi Pengolahannya ..... 211</b>		
9.	Penguatan Teknologi Pengolahan Hasil Hutan untuk Meningkatkan Nilai Hutan Indonesia (Yusuf Sudo Hadi) .....	213
10.	Hutan: Sumber Energi, Pangan, dan Obat-obatan (Wasrin Syafii) .....	225
11.	Kedaulatan Kampung Konservasi Biodiversitas Hutan dan Kesehatan Manusia Indonesia (Ervizal A.M. Zuhud) .....	241
12.	Pohon dan <i>Green Building</i> (Dodi Nandika dan Surjono Surjokusumo).....	283
<b>BAGIAN VI: Epilog..... 293</b>		
1.	Menuju Kehutanan Indonesia Baru: Paradigma dan Strategi Pembaruan.....	295

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Penguatan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Penguatan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



## BAB 2

# Membangkitkan Kehutanan Indonesia: Krisis dan Kristalisasi Konsep dan Strategi Implementasi

Oleh

D. Darmawan, Hardjanto, D. Suharjito, Bahruni, I. Ichwandi, Y.  
Sugroho, H. Kartodihardjo, Sudaryanto, B. Nugroho, D.R. Nurrochmat,  
L. Sulandawati, H. Purwawangsa, S. Trison, S. Soedomo

## Pengantar

Lebih dari empat dekade penyelenggaraan kehutanan, banyak kalangan menilai pembangunan kehutanan Indonesia secara relatif menunjukkan kinerja yang rendah.<sup>1</sup> Munculnya konflik di kawasan hutan negara, penegakan hukum yang lemah, kebutuhan negosiasi dan komunikasi di antara para pihak, kerusakan lingkungan semakin membunyah, dan menurunnya integritas, kualitas dan profesionalitas profesi kehutanan, semakin mendistorsi peran kehutanan bagi kemaslahatan bangsa. Sadar terhadap kondisi yang memprihatinkan ini, tim kami sebagai bagian masyarakat rimbawan kami merasa terpanggil untuk berpartisipasi aktif mengupayakan kebangkitan kehutanan melalui seculi ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang kami miliki. Tulisan singkat ini ditujukan untuk berkontribusi mewujudkan kebangkitan itu. Kontribusi pemikiran ini didasarkan kepada hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dan pengalaman serta pengetahuan yang dimiliki oleh staf pendidik Bagian Kebijakan Kehutanan, juga memanfaatkan berbagai sumber acuan lain.

## 2. Kinerja Sektor Kehutanan

Kehutanan sebagai salah satu sektor pembangunan memiliki tanggung jawab yang diukur melalui kinerjanya. Wujud kinerja sektor yang lazim digunakan dalam pembangunan disebut dengan *output* sektor. Meminjam pendekatan

<sup>1</sup> Salah satu dokumen yang memuat berbagai contoh kasus, bahasan, dan alternatif jalan keluar dapat dibaca pada buku *Kembali ke Jalan Lurus: Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia* (editor Kartodihardjo 2013)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan mengizinkan penyalinan sebagian atau seluruhnya.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.  
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

pengelolaan hutan lestari, maka kinerja yang dimaksud di sini diukur dalam dimensi prinsip kelestarian, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, selanjutnya disajikan contoh kinerja pada setiap dimensi sebagai berikut.

### a. Dimensi Ekonomi

Status kehutanan 2011 menunjukkan bahwa kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB menurun dari 1,18% tahun 2000 menjadi 0,70% pada tahun 2011. Sementara kawasan hutan yang dikuasai negara tetap sangat luas yaitu 131,8 juta hektare. Penguasaan sumber daya lahan yang besar oleh sektor kehutanan ternyata tidak memberikan peran yang nyata bagi pembangunan, setidaknya jika dilihat dari perannya terhadap PDB. Walaupun perhitungan PDB sesungguhnya tidak serta-merta menggambarkan sektor kehutanan dalam pembangunan karena nilai manfaatnya tidak semuanya dapat dikuantifikasikan secara ekonomi. Oleh karena itu, perlu dievaluasi apakah penurunan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB paralel dengan kinerja yang semakin menurun, tolok ukur yang digunakan untuk menilai kinerja yang kurang tepat, ataukah kedua-duanya. Nurrochmat dan Hasan (2012) menegaskan bahwa nilai PDB bukanlah satu-satunya tolok ukur kinerja pembangunan sektor kehutanan. Selain PDB, perlu pula diukur kontribusi sektor kehutanan terhadap berkembangnya sektor-sektor yang lain karena adanya keterkaitan ke depan (*forward linkages*) maupun keterkaitan ke belakang (*backward linkages*) serta efek pengganda (*multiplier impacts*) berupa *output*, pendapatan, maupun tenaga kerja yang dipengaruhi oleh kegiatan di sektor kehutanan (Nurrochmat dan Hasan 2012, Nurrochmat *et al.* 2010).

### b. Dimensi Sosial

Kementerian Kehutanan telah menyelenggarakan program pengelolaan hutan negara oleh masyarakat berupa Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang telah diperkenalkan sejak lebih dari lima belas tahun lalu, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Hutan Desa (HD) yang baru diinisiasi lima tahun terakhir. Program-program tersebut merupakan implementasi dari slogan *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor*, dan *pro-environment* yang diharapkan dapat meningkatkan akses dan hak masyarakat pada hutan negara. Namun demikian, faktanya alokasi kawasan hutan untuk pemanfaatan hutan skala kecil sangat rendah. Ditinjau dari proporsi luas lahan hutan negara yang dialokasikan untuk HTR,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

ada akumulasi pengetahuan dari hasil-hasil penelitian dan pengalaman, kami yakini perlunya perubahan paradigma pengurusan sumber daya hutan ke arah yang secara konseptual disarikan sebagai berikut.

### *Multipurpose Use of Forest*

Pengelolaan hutan yang bersandar pada ilmu kehutanan konvensional pada umumnya memandang manajemen hutan identik ilmu produksi kayu. Ilmu kehutanan alam perspektif demikian selama bertahun-tahun dipraktikkan di banyak negara, termasuk Indonesia. Beberapa tahun terakhir mulai muncul pemikiran baru yang melihat hutan dalam perspektif yang lebih luas, di mana ilmu dan pengetahuan pengelolaan hutan berorientasi multiguna dan multiproduk. Banyak negara seperti AS, Jepang, dan Korea telah mempraktikkan konsep ini. Sementara di Indonesia, hingga saat ini upaya mewujudkan pergeseran paradigma pengurusan hutan secara institusional ke arah *multipurpose use of forest* masih berkuat pada tataran wacana karena dianggap sulit merealisasikannya. Padahal, berbagai studi menunjukkan bahwa nilai manfaat hasil hutan kayu hanya berkontribusi sekitar 5% dari nilai ekonomi total hutan<sup>4</sup>. Dengan demikian, semestinya dalam unit manajemen pengelolaan dan pengusahaan hutan tidak boleh dibatasi hanya berorientasi untuk menghasilkan produk tunggal yang kenyataannya sangat justru membelenggu efektivitas pemanfaatan dan pelestarian sumber daya hutan<sup>5</sup>. Implementasi pengelolaan hutan alam yang multiguna ini memerlukan perubahan tentang kelembagaan pengelolaan hutan, sistem perencanaan, dan teknik pengelolaan hutan (Bahrani 2008, Bahrani *et al.* 2009, dan Bahrani *et al.* 2010). Selain itu juga diperlukan sejumlah perubahan peraturan-perundangan yang kini cenderung menjabarkan kebijakan bahwa satu jenis izin hanya untuk satu jenis komoditas dari hutan. Dalam rangka perbaikan kebijakan izin untuk restorasi ekosistem, telah dikemukakan pentingnya melakukan perbaikan kebijakan ini (Kartodihardjo 2013).

Usaha jasa lingkungan seperti wisata alam masih belum banyak dilakukan walaupun sederet fakta menunjukkan bahwa wisata alam memberikan kontribusi ekonomi yang besar. Wana Wisata Cilember adalah salah satu contohnya dengan luasan sekitar 5,9 hektare dapat menghasilkan lebih

4 Lihat Fakultas Kehutanan IPB (1999).

5 Lihat Darmawan (1995).



rang Rp1,5 miliar per bulan<sup>6</sup>. Contoh lain hasil penelitian manfaat *recreable* rekreasi hutan menunjukkan bahwa nilai ekonomi rekreasi hutan Pangandaran adalah sebesar Rp4,803 juta per hektare atau total Rp2,546 miliar tahun dengan total luas hutan Pangandaran 530 hektare. Nilai ekonomi manfaat rekreasi hutan Pangandaran jauh lebih besar dari nilai ekonomi kayu karena dapat diperoleh secara terus-menerus sepanjang tahun tanpa merusak ekosistem hutan alam Pangandaran (Hero 1993). Studi-studi sejenis tentang manfaat hutan untuk produk jasa, air, dan jasa lingkungan lainnya memberikan petunjuk bahwa semestinya pengelolaan hutan berorientasi pada berbagai macam manfaat, tidak hanya berbasis kayu tetapi juga mengembangkan secara sungguh-sungguh pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan (Sundawati dan Nurrochmat 2008; Nurrochmat *et al.* 2011) dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan untuk berkolaborasi (Suharjito *et al.* 2012).

## b. Penguatan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dan Industri Pedesaan

Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan sejatinya bukan hal yang baru di Indonesia, bahkan "Forest for People" diangkat sebagai tema Kongres Kehutanan Dunia ke VIII di Jakarta tahun 1978. Walaupun sistem pelibatan masyarakat ketika itu dirasakan masih belum sempurna karena kurang memerhatikan aspek kesetaraan dan keadilan, hutan pada masa itu kondisinya relatif baik. Pada era sekarang, fakta yang dapat disaksikan adalah di satu sisi hutan semakin rusak. Namun disisi lain pengelolaan hutan belum dapat menyejahterakan masyarakat. Dalam tatanan sosial-ekonomi-politik-budaya yang berbeda pada saat ini, diperlukan adanya suatu pendekatan baru dalam pengelolaan hutan, khususnya yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat. Peningkatan peran masyarakat adalah suatu keniscayaan dalam paradigma pengelolaan hutan karena (setidaknya) empat alasan (Darusman 2002), yaitu (1) masyarakat merupakan bagian integral dari ekosistem hutan, (2) masyarakat sebagai bagian yang sangat besar dari subjek dan objek pembangunan Indonesia, (3) masyarakat sebagai pihak yang selama ini terpinggirkan dalam pembangunan, serta (4) masyarakat merupakan kekuatan yang sangat besar dan signifikan baik secara positif maupun negatif terhadap keberadaan hutan.

<sup>6</sup> Angka diperoleh dari Laporan *Fieldtrip* mahasiswa Pascasarjana Program Studi Manajemen Ekowisata dan Jasa Lingkungan, Departemen KSHE, Fakultas IPB. Desember 2011 di bawah bimbingan Hardjanto.



Aspek yang perlu mendapat perhatian khusus terkait upaya peningkatan tata kelola hutan dan lahan gambut, yaitu:

- lemahnya penegakan hukum; dan
- biaya transaksi tinggi.

Pemerintah hendaknya lebih difokuskan pada pengendalian prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari dan menghapus intervensi yang terlalu teknis seperti menentukan jenis tanaman dan pola tanam.

## e. Politik Ekonomi Kehutanan Strategis

Pilihan strategi politik ekonomi kehutanan yang tepat adalah salah satu faktor kunci peningkatan kehutanan Indonesia. Dalam konteks politik ekonomi, perambahan kawasan hutan oleh masyarakat maupun penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non-kehutanan hendaknya tidak disikapi sebagai 'medan perang', tetapi seharusnya dianggap sebagai perubahan dinamika (naik-turun, fluktuasi, siklus bisnis). Dalam konteks ini, pemerintah harus dapat mengelola dinamika sosial dengan baik dan terarah. Pengusaha tetap bekerja keras dan tekun berpacu dengan waktu membangun hutan di wilayah usahanya. Bagaimanapun 'serbuan' perambahan itu ada batas keseimbangannya dan tidak mungkin "menghabiskan" wilayah usaha kehutanan. Oleh karena itu, strategi politik yang paling cerdas bagi pengusaha saat ini adalah apabila dengan pemerintah pusat/daerah ada jarak, justru dengan masyarakat setempat harus dekat, bergandengan tangan, bahkan bersahabat dengan warga desa, dan dengan pengusaha lokal yang tertarik kehutanan baik sebagai pekerja/pegawai, rekan usaha, *supplier* atau pemasaran, investor, dan bentuk kemitraan lainnya. Realitasnya memang tidak mudah mewujudkan kemitraan yang "bebas konflik kepentingan", apalagi dengan masyarakat lokal yang cara berpikirmen sudut pandang dalam melihat persoalan mungkin berbeda dengan pelaku usaha maupun pemerintah. Tata kelola sosial yang tepat, terarah, dan terpadu adalah tantangan sesungguhnya yang harus dihadapi pengelola hutan dan merupakan salah satu kunci terpenting untuk memastikan kelestarian pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

Pilihan politik ekonomi kehutanan Indonesia yang strategis sekarang adalah membangun hutan: cepat (*fast growing species*), hemat (kerjakan sendiri,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak cipta milik IPB Institut Pertanian Bogor  
Bogor Agricultural University



## Membangkitkan Kehutanan Indonesia: Kristalisasi Konsep dan Strategi Implementasi

... (tung), dan aman (bersama masyarakat). Jika pilihan politik ini dikerjakan dengan sebaik-baiknya, pada saat yang tidak terlalu lama diprediksi ketersediaan bahan baku kayu akan kembali besar, lalu dilanjutkan dengan semakin berkembangnya industri hilir kehutanan. Produk nonkayu yang memiliki prospektif secara bertahap harus dikembangkan. Demikian pula dengan produk yang selama ini dianggap sebagai komoditas “non-kehutanan” yang memiliki potensi pangan dan energi juga perlu dikembangkan dan sedapat mungkin diintegrasikan ke dalam sistem pengelolaan hutan. Stimulus ekspor produk kehutanan sangat diperlukan untuk menggairahkan industri kehutanan dari hulu sampai hilir.

... berbagai inisiatif global yang terkait dengan pengelolaan hutan di Indonesia hendaknya dapat digunakan untuk menguatkan kapasitas dalam melakukan pembaruan kebijakan dan langkah-langkah konkret di lapangan. Sebaliknya, diperlukan kehati-hatian dalam mengadopsi ide-ide global tersebut, karena dalam banyak hal persoalan yang hendak dipecahkan tidak sesuai dengan persoalan yang dialami pada tingkat lokal maupun nasional.

### A. Penutup

... Pendahnya kinerja pengelolaan hutan disebabkan oleh berbagai macam faktor. Setidaknya ada tiga persoalan elementer yang diduga menjadi akar permasalahan carut-marutnya pengelolaan hutan di negeri ini, yaitu (1) paradigma pengelolaan hutan di Indonesia hingga saat ini masih bersifat parsial, (2) otoritas kehutanan lebih mengedepankan status kawasan hutan daripada fungsi hutan, dan (3) pembangunan kehutanan terkungkung dalam sekat komoditas sektoral daripada pengembangan nilai manfaat sumber daya hutan yang adaptif dan menyejahterakan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan-kebijakan pemungkin (*enabling policies*) dengan mengedepankan arah strategi implementasi sebagai berikut.

... Pertama, mengubah orientasi pengelolaan hutan yang bersifat parsial menjadi pengelolaan hutan terpadu. Pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan secara parsial tidak hadir secara kebetulan karena hal ini digariskan dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 yang tidak mengenal terminologi Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) melainkan Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, dan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan sebagai suatu bentuk rezim perizinan parsial. Bahkan, izin usaha tersebut dipecah-pecah lagi dalam bentuk yang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



## BAB 2

### Membangkitkan Kehutanan Indonesia: Kristalisasi Konsep dan Strategi Implementasi

Kondisi kehutanan dan komoditas non-kehutanan merupakan persoalan yang menempatkan sektor kehutanan sebagai “musuh bersama” bagi sektor-sektor pembangunan lainnya. Pada sisi yang lain, walaupun faktanya hutan tidak hanya menghasilkan kayu tetapi juga jasa lingkungan, sumber pangan, obat-obatan, bahan alam, energi dan manfaat lainnya, tetapi yang tercatat sebagai kontribusi sektor kehutanan hanya komoditas dasar berbasis kayu dan produk kehutanan kayu yang secara “tradisi” telah dianggap sebagai komoditas bernilai tinggi seperti rotan, getah pinus, getah damar, atau satwa liar. Sementara itu, jasa lingkungan sebagai sumber pangan walaupun nilainya sangat besar secara ekonomi pernah dianggap sebagai kontribusi sektor kehutanan. Demikian halnya produk-produk yang bernilai ekonomi tinggi seperti karet, kopi, cokelat, kelapa, teh, vanila, dan berbagai komoditas ekspor walaupun tumbuh di dalam kawasan hutan tidak pernah dicatat sebagai hasil hutan. Padahal, faktanya tanaman-tanaman tersebut telah dibudidayakan oleh masyarakat, mendongkrak perekonomian masyarakat, dan secara teknis dapat dikembangkan di dalam kawasan hutan melalui pola *agroforestry*. Praktik-praktik penanaman komoditas yang bernilai ekonomi tinggi di dalam kawasan hutan cenderung dianggap pemerintah dan sebagian rimbawan sebagai bentuk “perambahan” yang harus diberangus, bukan diakomodir, diregister, dan diarahkan untuk dikelola secara lebih baik dan lestari dalam skema *agroforestry*. Sepanjang tidak membahayakan fungsi kawasan, penanaman komoditas bernilai ekonomi tinggi yang diterima oleh masyarakat justru harus dikembangkan karena faktanya dalam banyak kasus keberadaan komoditas yang mengandalkan hasil nonkayu seperti getah karet atau kopi justru menyelamatkan lebih banyak tegakan hutan karena masyarakat tidak lagi menebang kayu sebagai sandaran hidup. Pada aras ini, jelas bahwa yang diperlukan dari seorang rimbawan bukan “melarang” tetapi membantu masyarakat menentukan jenis dan komposisi tanaman-tanaman dalam pola *agroforestry* secara tepat sesuai dengan fungsi hutan melalui kegiatan penelitian, pengembangan, dan pendampingan. Apabila hal ini dilakukan, ke depan berbagai persoalan sosial kehutanan akan sangat berkurang dan peran sektor kehutanan dalam pembangunan nasional dari berbagai indikator seperti PDB, *linkages*, *multiplier impacts*, pengentasan kemiskinan, dan tolok ukur lainnya dapat dipastikan akan menguat.

## 5. Daftar Pustaka

Ariyadi. 2014. Hubungan Nilai Sosial dan Karakteristik Pengusaha dengan Perilaku Kewirausahaan pada Industri Kecil Berbahan Baku Kayu di Tasekmalaya [Skripsi]. Bogor: Jurusan Manajemen Hutan IPB.

Membangkitkan Kehutanan Indonesia:  
Kristalisasi Konsep dan Strategi Implementasi

Kartodihardjo H. 1999. *Laporan Kajian Sistem Nilai Hutan, Kerjasama Departemen Kehutanan dan Fakultas Kehutanan IPB*.

Kartodihardjo H, Abidin R, Hardjanto, dan Suhendang E. 1990. *Sistem Pengelolaan Hutan Rakyat*. Bogor: Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor.

Kartodihardjo H, Abidin R, Hardjanto, dan Suhendang E. 1991. *Studi Kemungkinan Pengembangan Konservasi Lahan melalui Hutan Rakyat*. Bogor: Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

Hardjanto. 2003. *Keragaan dan Pengembangan Usaha Kayu Rakyat di Pulau Jawa* [Disertasi]. Bogor: Sekolah Pascasarjana IPB.

Hardjanto dan Trison S. 2010. *Pengembangan Hutan Rakyat untuk Penyediaan Kayu Energi dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Hardjanto, Hero Y, dan Trison S. 2011. *Desain Kelembagaan Usaha Hutan Rakyat untuk Mewujudkan Kelestarian Hutan dan Kelestarian Usaha Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pedesaan*. Bogor: Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

Hero Y. 1999. *Evaluating Social Benefits of Forest Recreation in Pangandaran. A Case Study* [Master Thesis]. Gottingen: Georg August University.

Wandi I, Shinohara T, and Nakama Y. 2007. *The Characteristics of Private Forest Management in Wonogiri District, Central Java, Indonesia and It's Contribution to Farm Household Income and Village Economy. Tropics Vol. 16 (2): 103-114*.

Kartodihardjo H. 2010. *Esei Persoalan Kebijakan Kehutanan: Kebijakan Penetapan Sistem Silvikultur Telaah Kelemahannya sebagai Secondary Rules*. Buku Seri I. Kebijakan Produksi Pengelolaan Hutan Alam dan Silvikultur. Balai Besar Penelitian Dipterokarpa. Samarinda: Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.

Kartodihardjo H. 2013. *Input bagi Kebijakan Restorasi Ekosistem di Hutan Produksi dan Verifikasi Kinerjanya*. Paper disampaikan dalam Seri Diskusi mengenai Konsep, Kebijakan dan Implementasi Restorasi Ekosistem: Lesson Learned, Prospek dan Tantangan. Kampus IPB Darmaga.

Kartodihardjo H, Nugroho B, Suharjito S, dan Darmawan A. 2013. *Constraints in policy renewal of forest utilization for local community: Case of Development of People Plantation Forests*. Bogor: CIFOR.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



BAB 2  
Membangkitkan Kehutanan Indonesia:  
Kristalisasi Konsep dan Strategi Implementasi

- Suharjito D. 2005. Paradigma Baru Pengelolaan Hutan: Belajar dari Pengelolaan Ekosistem Hutan oleh Masyarakat. Dalam Nugroho B, Suharjito D, Soedomo S, dan Kartodihardjo H. *Paradigma Pengelolaan Sumberdaya Alam Indonesia di Masa Mendatang*. Bogor: Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
- Suharjito D. 2009. Devolusi Pengelolaan Hutan di Indonesia: Perbandingan Indonesia dan Philipina. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. Vol. XV No. 1.
- Suharjito D. 2011a. *Integrating Community Forestry and Forest Products Based Rural Industrialization for Enhancing Rural Community Welfare and Sustaining Forest Resources*. Paper presented at the International Conference of Indonesia Forestry Researchers, Bogor 5-7 December 2011.
- Suharjito D. 2011b. Tradisi dan Perubahan Budidaya Pohon di Desa Rambahan Kuansing dan Desa Ranggung Tanah Laut. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* Vo. XVII No. 3.
- Suharjito D, Bahruni, Hero Y, Muhdin, Purwawangsa H, Mulyana D, dan Rahayu S. 2012. *Laporan Model Pengelolaan Kawasan Hutan Babakan Mangrove Bogor*. Bogor: Kerjasama Perum Perhutani dan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
- Suharjito D. 2013. Reforma Agraria di Sektor Kehutanan: Mewujudkan Pengelolaan Hutan Lestari, Keadilan Sosial dan Kemakmuran Bangsa. Dalam Kartodihardjo H. (Editor). *Kembali ke Jalan Lurus: Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia*. Yogyakarta: Forci Development dan Tanah Air Kita.
- Sundawati L dan Nurrochmat DR (Editor). 2008. *Pemasaran Produk-Produk Agroforestry*. Bogor: IPB-SEANAFE-ICRAF.
- Suryanto dan Nurrochmat DR, Priyono H, Suyana A, dan Budiaman A. 2010. *Multisistem Silvilkultur. Menjadikan Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Menjadi Lebih Baik. Policy Brief*. Jakarta: Kementerian Kehutanan.
- UNDP. 2013. *Indeks Tata Kelola Hutan, Lahan dan REDD+ 2012 di Indonesia*. Jakarta: UNDP Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



# PEMBANGUNAN KEHUTANAN INDONESIA BARU

## Refleksi dan Inovasi Pemikiran

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

"kehutanan ilmiah" yang disamakan dengan kehutanan yang dikontrol pemerintah terus mendapat kritik dan didorong untuk dialihkan kepada "kehutanan masyarakat" (*community forestry*) dengan pengetahuan lokalnya. Penting untuk dipahami bahwa pengetahuan lokal tidak berarti tidak ilmiah. Tentu saja dukungan pengetahuan ilmiah (dalam arti pengetahuan modern yang dilahirkan dari universitas atau lembaga-lembaga penelitian) sangat penting untuk menguatkan pengetahuan lokal. Oleh karena itu, "perkawinan" antara pengetahuan yang dihasilkan oleh masyarakat dan pengetahuan yang dihasilkan oleh ilmuwan sangat penting. Di sinilah kontribusi ilmu pengetahuan dari para ilmuwan menemukan komunitas yang menantikan, tidak hanya disampaikan kepada pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Dengan demikian, tidak perlu ada *scientific forestry versus community forestry*.

Buku ini menyajikan kembali ilmu pengetahuan (konsep, teori, teknologi) kehutanan yang ditawarkan untuk pembangunan kehutanan ke depan. Sebagai ilmuwan tidak bosan-bosannya menawarkan pemikiran sebagai wujud kontribusinya untuk kemajuan bangsa. Semoga karya ini dapat diterima dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang intens bergelut di bidang kehutanan dan masyarakat pada umumnya.

**PT Penerbit IPB Press**  
 Kampus IPB Taman Kencana  
 Jl. Taman Kencana No. 3, Bogor 16128  
 Telp. 0251 - 8320158 E-mail: ipbpress@ymail.com

Penerbit IPB Press @IPBpress

